

Komodifikasi Politik Identitas dalam Program Catatan Demokrasi di Stasiun tvOne

Commodification of Identity Politics in the Democracy Notes Program at tvOne Station

*Syaiful Halim^{1,2}

¹Universitas Mathla 'ul Anwar Banten, INDONESIA

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, INDONESIA

*syaifulhalim@gmail.com

*Corresponding author

Received: 12 October 2022, Accepted: 31 March 2023, Published: 1 April 2023

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan praktik komodifikasi politik identitas dalam program Catatan Demokrasi di stasiun tvOne pada Juni 2022 menurut kerangka semiotika sosial Halliday. Metode penelitian yang digunakan adalah Semiotika Sosial Halliday. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perayaan komodifikasi perayaan politik identitas di media televisi bukan sekadar gambaran keterkaitan relasi agama dan pemeluk agama, juga media. Kesimpulan ini juga membuktikan degradasi definisi politik identitas, yaitu kampanye hitam kelompok masyarakat tertentu atas kehidupan keagamaan individu atau kelompok masyarakat tertentu.

Kata kunci : komodifikasi; politik identitas; semiotika; televisi.

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the practice of commodification of identity politics in the Catatan Demokrasi program on tvOne station in June 2022 according to Halliday's Social Semiotic framework. The method in this research is Halliday's social semiotics. The conclusion of this study is the celebration of the commodification of identity politics celebration on television media is not just a description of links to the relationship between religion and religious followers, as well as the media. This conclusion also proves the degradation of the definition of identity politics, namely the black campaign of certain community groups over the religious life of certain individuals or community groups.

Keywords : commodification; identity politics; semiotic; television.



eISSN: 2550-214X © 2023. Published for Ideology Journal by UiTM Press. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way.

1. PENDAHULUAN

Pilkada di DKI Jakarta pada 2012, bisa dikatakan, menjadi pembuka ajang pergelaran pertama mobilisasi berbasis politik identitas sepanjang sepuluh tahun terakhir. Pasangan Fauzi

Bowo dan Nachrowi Ramli (berasal dari identitas etnis Betawi) bertarung melawan pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (perpaduan etnis Jawa dan etnis Tiong Hoa). Dalam konteks penelitian ini, politik identitas memunculkan persoalan kesukuan atau etnis (Sabarudin, 2018).

Pilkada 2017 di DKI Jakarta dan Pilpres 2019 menyempurnakan keberadaan konflik sosial bermuatan isu politik identitas (Fautanu, Idzam, M, Buhori, dan Gunawan, 2020). Pilkada 2017 di DKI Jakarta memecah masyarakat menjadi pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pendukung Anis Rasyid Baswedan, dan kelompok masyarakat nonpendukung kedua kandidat, secara ekstrim. Kasus penodaan agama yang menjerumuskan Ahok ke penjara selama dua tahun bukan hanya menjadi pemicu polemik politik identitas di ruang *offline*, tetapi juga dalam konteks *online* (Triantoro, 2019). Isu ini juga yang menjadi menu *black-campaign* kader-kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan para buzzerRp (sebutan untuk sekelompok netizen yang dianggap propemerintah dan kerap menghantam kelompok pengkritik pemerintah) di berbagai forum dan media.

Lebih jauh lagi, warga di Jakarta dan kota-kota lain, atas nama fanatisme terhadap kandidat tertentu, dipilah dengan sebutan cebong (anak katak) dan kampret (kalelawar). Cebong merupakan istilah dari para netizen (warga dunia maya) kepada pendukung Joko Widodo (Presiden RI sekarang), sedangkan kampret merupakan istilah dari para netizen kepada pendukung Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan RI sekarang). Belakangan kelompok cebong memunculkan istilah kadrun (kadal gurun), untuk menstigma kelompok ulama atau tokoh-tokoh tertentu yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Bahkan, setelah Prabowo Subianto bergabung menjadi bagian dari Kabinet Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, konflik sosial bernuansakan politik identitas terus mengemuka. Dalam konteks ini, politik identitas memunculkan persoalan agama.

Temuan varian politik identitas dari contoh kasus di atas memberikan gambaran tentang karakteristik politik identitas yang khas Indonesia, yakni masalah etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya oleh para elit dengan artikulasinya masing-masing (Maarif, 2012). Pada era sebelum ini, Maarif menjelaskan, RMS (Republik Maluku Selatan), GAM (Gerakan Aceh Merdeka), dan GPM (Gerakan Papua Merdeka) adalah perwujudan dari kegelisahan etnis-etnis ini terhadap politik sentralistik Jakarta yang dirasa sangat tidak adil; Gerakan DI (Darul Islam) di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan, menggunakan agama sebagai payung ideologi politik identitas mereka (Maarif, 2012).

Pemahaman politik identitas mengacu pada gagasan filsuf poststrukturalis-postmodernis Prancis, Michel Foucault (1991: 87-104), yang mengkritik konsekuensi-konsekuensi negatif modernisme dan menunjukkan keberpihakannya pada “wacana-wacana yang tertindas” dari “wacana besar” yang mendominasi dan mengontrol, yang kemudian disebut politik identitas (biopolitik) seperti perbedaan-perbedaan tentang politik tubuh (Sabarudin, 2018). Konsep kuncinya adalah perjuangan wacana tertindas terkait perbedaan-perbedaan politik tubuh.

Bourdieu (1983) mengartikan identitas sebagai sesuatu yang lain dengan menyebut kategori *native* (penduduk asli/pribumi), *folk* (rakyat), atau *lay* (awam/biasa) di mana kategori-kategori ini berkembang dan menyebar pada aktor masyarakat biasa sebagai pembeda dari kategori pengalaman terpisah yang dipergunakan oleh para analis sosial (Sabarudin, 2018). Kategori *native*, *folk*, atau *lay*, ini sebangun dengan konsep kunci perbedaan-perbedaan politik tubuh,

yang oleh Maarif dimaknai sebagai etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal.

Khusus untuk fenomena dalam penelitian, penulis mencurigai terjadinya degradasi batasan politik identitas yang “perjuangan wacana tertindas terkait perbedaan-perbedaan politik tubuh berupa etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal”. Pada akhirnya, dekonstruksi atas batasan inilah yang dikhawatirkan melahirkan polarisasi dan ancaman disintegrasi bangsa. Keanekaragaman (atas nama *Bhineka Tunggal Ika*) yang selama ini menjadi slogan indah Nusantara dikhawatirkan menjadi terkoyak-koyak. “Politik identitas” menjadi kata kunci penting dalam konteks ini.

Selain itu, kekhawatiran demi kekhawatiran ini terjadi, menurut penulis, karena sumbangsih ruang komunikasi publik bernama media sosial. Sukses menjadi opini publik di media sosial, media *mainstream*, termasuk media televisi, mengambil kesempatan untuk ambil bagian dan meraih peruntungan dari kegaduhan di dunia maya ini. Perayaan isu politik identitas di media televisi ini secara gegap-gempita ini diperlihatkan dengan intensitas dan frekuensi pemunculan tema-tema politik identitas di media televisi, baik berupa program berita maupun berupa program *talk show*. Para narasumber dari berbagai latar belakang bermunculan seraya melontarkan pendapat, pernyataan, asumsi, gagasan, kritik, dan segala omong kosong, bak selebritas di program-program *infotainment*. Para *host* program *talk show* begitu bersemangat untuk bertanya, memancing, bahkan memprovokasi, para narasumber, agar mereka menyampaikan pernyataan-pernyataan lebih panas dan hiperbola, bahkan menyulut emosi narasumber lain. Adrenalin penonton pun dipacu menjadi meninggi demi merasakan atmosfer perdebatan. Inilah buah praktik komodifikasi isi media di media televisi.

Komodifikasi merupakan kegiatan produksi dan distribusi komoditas yang lebih menimbang daya tarik agar bisa dipuja oleh orang sebanyak-banyaknya, tanpa mempertimbangkan konteks sosial, serta diimplementasikan dalam tiga aspek: isi media, khalayak, dan pekerja (Halim, 2021). Temuan dari penelitian penulis bertepatan postkomodifikasi media adalah aspek keempat dari praktik komodifikasi, yakni organisasi (Halim, 2021).

Intinya, media televisi memberikan kontribusi besar dalam penyediaan ruang besar dalam pendistribusian peristiwa pilkada dan pilpres, persisnya terkait wacana politik identitas. Situasi ini dengan sendirinya membuat media televisi juga berkontribusi dalam melahirkan persoalan polarisasi dan ancaman disintegrasi bangsa. “Komodifikasi” menjadi kata kunci penting dalam konteks ini.

Bahwa politik identitas merupakan konsep yang memperlihatkan perjuangan wacana tertindas terkait perbedaan-perbedaan politik tubuh berupa etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal. Ketika konsep ini ditautkan dengan konsep komodifikasi, maka ia menjelma menjadi sebuah kegiatan produksi dan distribusi komoditas berupa perbedaan-perbedaan politik tubuh berupa etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal, yang lebih menimbang daya tarik agar bisa dipuja oleh orang sebanyak-banyaknya, tanpa mempertimbangan konteks sosial, serta diimplementasikan dalam empat aspek: isi media, khalayak, pekerja, dan organisasi.

Politik identitas merupakan *subject matter* dalam penelitian dari pendekatan sosiologis, persisnya terkait hubungan antara manusia dengan fitrah identitasnya dan kehidupan masyarakat kontemporer yang semakin kompleks. Salah satu penyumbang karakter

kompleksitas ini adalah keanekaragaman menurut agama dan keyakinan. Politik identitas merupakan celah hitam yang berpotensi menciptakan polarisasi dan ancaman disintegrasi bangsa, serta menghambat terciptanya ruang besar bernama semangat keanekaragaman.

Komodifikasi juga merupakan *subject matter* dalam penelitian dari pendekatan sosiologis, persisnya terkait keberadaan ruang pertarungan isu-isu kehidupan sosiokultural manusia, yang salah satu di antaranya juga menghadirkan polemik-polemik manusia dan kehidupan keagamaannya. Seperti politik identitas, komodifikasi juga merupakan celah hitam yang berpotensi menciptakan polarisasi dan ancaman disintegrasi bangsa, serta menghambat terciptanya ruang besar bernama semangat keanekaragaman.

Paduan kata kunci “komodifikasi” dan “politik identitas” hingga menjadi *komodifikasi politik identitas* merupakan *subject matter* penelitian dari pendekatan sosiologis, yang menjadi gerbang dalam pembahasan fenomena-fenomena yang mempertautkan hubungan antara agama dan pengikut agama, serta media. Persisnya, teks-teks media yang diproduksi dan didistribusikan oleh para awak media (dengan identitas keagamaannya dan pemahamannya tentang agama).

Penelitian-penelitian yang mempertemukan hubungan antara agama dan pengikut agama, serta media (dalam bahasa yang lebih mudah, agama dan media), sebenarnya bukan hal baru. Bahwa pintu gerbang penelitian-penelitian bertemakan agama dan media selama 22 tahun terakhir adalah ketika stasiun berita internasional melalui satelit dan televisi kabel menyiarkan runtuhnya menara kembar World Trade Centre (WTC) di New York, Amerika Serikat, pada 11 September 2001. Rakhmani mencatat bahwa peristiwa ini memicu hubungan yang tegang antara Islam dan Barat. Stigma 'terorisme Islam' terus-menerus digambarkan dan dimonetisasi oleh media dunia, hingga memperburuk pemahaman tentang Islam secara salah, sekaligus mengaburkan pemahaman tentang makna keragaman yang juga dikembangkan oleh umat Muslim (Rakhmani, 2016).

Stigma buruk tentang Islam yang dianggap antikeanekaragaman, radikalisme, fundamentalis, intoleran, dan sebutan negatif lain, mendapatkan porsi besar di halaman-halaman media cetak dan slot-slot media elektronik—termasuk media di Tanah Air. Green dan Searle-Chatterjee (2008, hlm. 1) mengamati bahwa wacana agama telah membentuk perubahan besar di dunia dalam dua abad terakhir (Al-Azami, 2016). Dalam artian, peristiwa kelam bagi Negara Adidaya ini juga menjadi cerita buruk bagi dunia Islam. “Sukses” ini berkat keberhasilan media *mainstream* dalam mengonstruksi cerita buruk tentang Islam—yang diidentikkan sebagai teroris.

Kembali ke pembahasan tentang *komodifikasi politik identitas* sebagai *subject matter* penelitian dari pendekatan sosiologis. Bahwa pendekatan sosiologis merupakan salah satu pendekatan dalam kajian-kajian Studi Agama-agama. Dalam mendeskripsikan fenomena penelitian, Studi Agama-agama menggunakan pendekatan perenial, historis, teologis, sosiologis, fenomenologis, antropologis, psikologis, komparatif, dan dialogis (Bahri, 2015), serta feminis (Connolly (ed), 2012). Sebagai konsep yang masih berkembang (*on going*), Studi Agama-agama juga menyediakan ruang besar bagi disiplin lain, termasuk pendekatan komunikatif dan linguistik—kedua penelitian memberikan sumbangsih dalam penjelasan objek penelitian dan metode penelitian dalam konteks penelitian ini.

Dengan demikian, *komodifikasi politik identitas* merupakan fokus penelitian dalam kegiatan penelitian ini. Sementara pendekatan komunikatif dan pendekatan linguistik menjadi rujukan

persoalan objek penelitian dan metode penelitian. Fokus penelitian ini menjadi pilihan, karena penulis melihat kecenderungan sebaran informasi bertemakan politik identitas jelang pemilihan presiden 2024 di media sosial dan media *mainstream*, khususnya media televisi, yang cenderung meningkat. Baik kalangan masyarakat yang diwakili oleh lembaga survey, Komisi Pemilihan Umum (Trianto, 2022), maupun pemerintah yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Dessy Suciati Saputri, 2022), sudah memberikan peringatan soal peningkatan eskalasi kegaduhan terkait wacana politik identitas.

Untuk menjawab kecurigaan muatan wacana bernuansa politik identitas dalam *program Catatan Demokrasi*, penulis melakukan penelitian terhadap teks yang diperlihatkan dalam program *Catatan Demokrasi* bertema *Siapa di Balik FPI Reborn?* di stasiun *tvOne* pada pertengahan Juni 2022 (tvOne, 2022). Tujuan penelitian ini, penulis ingin mengetahui praktik komodifikasi politik identitas dalam program *Catatan Demokrasi* bertema *Siapa di Balik FPI Reborn?* di stasiun *tvOne* pada Juni 2022 menurut kerangka semiotika sosial M.A.K. Halliday. Fokus penelitiannya, komodifikasi politik identitas; objek penelitiannya, *Catatan Demokrasi* bertema *Siapa di Balik FPI Reborn?* di stasiun *tvOne* pada pertengahan Juni 2022; dan metode penelitiannya, Semiotika Sosial M.A.K. Halliday (selanjutnya disebut Semiotika Sosial Halliday).

Halliday memberi tekanan pada keberadaan konteks sosial bahasa, yakni fungsi sosial yang menentukan bentuk bahasa dan bagaimana perkembangannya (Halliday, 2007). Dari kedua batasan ini, menurut penulis, Halliday menempatkan bahasa sebagai persoalan utama dalam semiotika sosial. Formulasi bahasa sebagai semiotik sosial berarti menafsirkan bahasa dalam konteks sosiokultural tempat kebudayaan itu ditafsirkan dalam terminologis semiotis sebagai sebuah sistem informasi (Santoso, 2008). Dalam pandangan Halliday, kajian bahasa sebagai semiotik sosial mencakup sub-subkajian: teks; trilogi konteks situasi (medan wacana, pelibat wacana, dan modus wacana); register; kode; sistem lingual yang mencakup komponen ideasional, interpersonal, dan tekstual; serta struktur sosial (Halliday, 2007).

Uraian lengkap atas pandangan Halliday soal subkajian semiotika sosial diuraikan dalam Tabel 1.

Tabel 1: Kajian Bahasa sebagai Semiotik Sosial (A. Santoso, 2008)

SUBKAJIAN	PENJELASAN
Teks	Teks adalah bahasa yang sedang melaksanakan tugas tertentu dalam konteks situasi. Teks merupakan unit semantis yang direalisasikan dalam bentuk kalimat, memproyeksikan makna kepada <i>level</i> yang lebih tinggi, proses sosiosemantis yang memuat peristiwa sosiologis, serta makna teks ditentukan faktor situasi.
Trilogi Konteks Situasi	Situasi adalah lingkungan tempat teks beroperasi yang mencakup keseluruhan lingkungan, baik lingkungan tutur (verbal) maupun lingkungan tempat teks itu diproduksi (diucapkan atau ditulis). Konteks situasi terdiri atas tiga unsur, yakni medan wacana, pelibat wacana, dan modus wacana.
Register	Register merupakan konsep semantis yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan makna yang dihubungkan secara khusus dengan susunan situasi tertentu dari medan, pelibat, dan sarana. Terdapat dua hal pokok dalam pengertian register. <i>Pertama</i> , register disamakan dengan gaya (<i>style</i>), yakni variasi dalam tuturan atau tulisan seseorang. <i>Kedua</i> , register adalah variasi tuturan yang digunakan oleh kelompok tertentu yang biasanya memiliki pekerjaan yang sama atau kepentingan yang sama.
Kode	Kode merupakan prinsip organisasi semiotik yang mengatur pilihan makna oleh penutur dan penafsiran pendengar. Kode diaktualisasikan dalam bahasa melalui register. Kode menentukan orientasi semantis penutur dalam konteks sosial tertentu. Kode bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi dapat digolongkan menjadi dua: kode lengkap dan kode terbatas.

Sistem Lingual	Sistem lingual (<i>linguistic system</i>) terdiri atas tiga tingkatan: semantik, leksikogramatis, dan fonologis dengan menempatkan sistem semantis menjadi perhatian utama dalam konteks sosiolingual.
----------------	--

Dalam kegiatan penelitian teks media, kajian bahasa sebagai semiotika sosial lebih banyak direpresentasikan melalui trilogi konteks situasi. Misalnya, penelitian terhadap sejumlah media cetak di Tanah Air terkait laporan soal PKI/komunisme (Sudiby, 2009); kontroversi isu penolakan pemimpin nonmuslim di tengah masyarakat muslim di *republika.co.id* dan *suarapembaruan.com* (Haq, 2014); citra media berdasarkan penggunaan gaya bahasa pada rubrik *Esai* di *mojok.co* (Indah, 2019); juga transformasi simbolik homoseksual dalam program *CS: File Kompas TV* (Lobodally, 2014). Menurut Agus Sudiby, kerangka kerja yang memungkinkan untuk membedah interaksi antara teks dan situasi (konteks) didasarkan pada tiga konsep: medan wacana (*field of discourse*), pelibat wacana (*tenor of discourse*), dan mode wacana (*mode of discourse*) (Sudiby, 2009).

Menurut penulis, meski implementasi kerangka kerja semiotika sosial Halliday hanya direpresentasikan melalui subkajian trilogi konteks sosial, ternyata uraian atas masing-masing konsep bersinggungan juga dengan subkajian lain. Misalnya, uraian tentang medan wacana (*field of discourse*) bersinggungan dengan subkajian teks; dan uraian tentang mode wacana (*mode of discourse*) bersinggungan dengan subkajian register, kode, sistem lingual, dan struktur sosial.

Terkait objek penelitian penulis yang merupakan program *talk show* di media televisi, maka penulis mencoba melakukan penyesuaian. Persisnya, terkait rupa teks yang berupa *audio visual*. Adaptasi yang penulis lakukan, memfokuskan pada narasi-narasi berupa *audio* (narasi) dari *host* dan para narasumber, juga memerhatikan video (mimik dan *gesture* dari *host* dan para narasumber). Dalam program *talk show*, *host* memegang peran penting dalam mengatur lalu lintas diskusi dan menjaga konsistensi narasi-narasi para narasumber agar sesuai dengan tema program. Sementara para narasumber juga berperan penting dalam menampilkan narasi-narasi argumentatif soal tema program. Selain narasi, mimik dan *gesture* para narasumber, menjadi pelengkap informasi guna mendapati karakter komodifikasi isi media pada program *talk show* dari stasiun televisi berita, yakni pemilihan materi genre bertema sensasional dan para narasumber memunculkan narasi bersifat hiperbola dan provokatif.

2. HASIL PENELITIAN

Stasiun *tvOne* merupakan jaringan televisi nasional di Indonesia yang berfokus pada konten berita. Pada awalnya, stasiun televisi di bawah manajemen PT. Lativi Media Karya ini bernama *Lativi*—mengacu pada nama pemilik stasiun televisi ini, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Abdul Latief (tvOne, 2008). Setelah berganti kepemilikan saham, pada 14 Februari 2008 *Lativi* berganti nama menjadi *tvOne*. Segmen media ini, masyarakat Indonesia berusia 15 tahun ke atas dan ragam programnya mencakup berita dan olahraga, baik nasional maupun internasional. Khusus untuk berita, stasiun ini menyajikan dalam bentuk program berita dan program *talk show* (tvOne, 2008).

Sejak 16 Maret 2021, stasiun *tvOne* menghadirkan program *talk show* bertajuk *Catatan Demokasi*. Konsep program ini, perbincangan tentang berbagai isu dan peristiwa aktual dan penting di Indonesia, dengan narasumber para *newsmaker* kompeten dan kredibel (Sonny, 2021). Isu dan peristiwa aktual dan penting yang dimaksud biasanya menyangkut persoalan hukum dan politik. Selain didistribusikan melalui transmisi milik stasiun *tvOne* ke pesawat

televisi di seluruh Indonesia, program ini juga di-streaming melalui media sosial *YouTube* dan situs *tvOne.com*.

Program *Catatan Demokrasi* episode *Siapa di Balik FPI Reborn?* di stasiun *tvOne* pada pertengahan Juni 2022 menampilkan **Andromeda Mercury** dan **Maria Assegaf** sebagai *host*; serta **Novel Bakmumin** (Wakil Sekjen PA 212), **Husin Shihab** (mantan Ketua Cyber Indonesia), **Islah Bahrawi** (Ketua Jaringan Moderasi Indonesia), dan **Mustofa Nahrawardaya** (politisi Partai Umat). Program dibuka sebuah *opening bump break* (OBB) *Catatan Demokrasi*. Setelah itu, kedua *host* membuka acara dan langsung menayangkan *video tape* tentang peristiwa dan *footage* aksi deklarasi pencalonan Anies Baswedan sebagai Presiden Indonesia pada Pilpres 2024 oleh sekelompok warga yang menyebutkan diri sebagai Front Persaudaraan Islam (FPI) *reborn*. Kata “FPI *reborn*” ini menjadi pemantik diskusi.



Gambar 1: Video Tape Aksi Deklarasi FPI Reborn Mengawali Program *Catatan Demokrasi* di Stasiun *tvOne* (Foto: *tvOne*).

Seperti telah disinggung di atas bahwa dalam program *talk show*, *host* memegang peran penting dalam mengatur lalu lintas diskusi dan menjaga konsistensi narasi-narasi para narasumber agar sesuai dengan tema program. Sementara para narasumber juga berperan penting dalam menampilkan narasi-narasi argumentatif soal tema program. Meski begitu, suasana diskusi juga bisa memicu *host* atau para narasumber untuk menghamburkan ide-ide atau wacana-wacana yang sesuai dengan tema program, atau sebaliknya, tidak sesuai dengan tema program alias bias.

Berikut ini uraian ide-ide atau wacana-wacana *host* dan narasumber dalam objek penelitian. Program ini dipandu oleh jurnalis muda *Andromeda Mercury* dan *Maria Assegaf* sebagai *host* program. Kedua *host* menyampaikan narasi-narasi berupa pernyataan atau pertanyaan sebagai berikut: aksi deklarasi pencalonan Anies Baswedan sebagai Presiden Indonesia pada Pilpres 2024 oleh warga yang menyebutkan diri sebagai *FPI reborn*; *FPI* Petamburan menyangkal keterlibatan dalam aksi deklarasi; kemungkinan desain di balik aksi deklarasi; skenario dan penyandang dana aksi deklarasi; keberadaan massa bayaran sebagai pelaku aksi deklarasi; posisi pemerintah menyikapi aksi deklarasi. Selain itu, pada akhir program mereka juga menambahkan tema baru: keberadaan *Khilafatul Muslimin*; aksi *PFI reborn* dan *Khilafatul Muslimin* bertentangan dengan ideologi; pihak yang memelihara “ormas” bermasalah; persoalan kebencian; siapa yang dimaksud Islam liberal; posisi pemerintah menyikapi seluruh peristiwa.

Gaya bertutur kedua *host*: menggunakan bahasa baku; menyampaikan narasi/pertanyaan dengan intonasi datar; menyampaikan pertanyaan dengan narasi dan intonasi provokatif.

Mereka juga kerap memotong pernyataan narasumber; membiarkan pernyataan narasumber yang melebar; membiarkan perdebatan secara bebas; membiarkan kericuhan terjadi; memberikan porsi berbicara yang tidak berimbang; mengambil *microphone* narasumber.

Narasumber pertama, Novel Bakmumin, menyampaikan narasi-narasi berupa pernyataan atau pertanyaan sebagai berikut: status hukum FPI; FPI tidak terlibat aksi deklarasi; FPI menyelidiki pelaku-pelaku aksi deklarasi; FPI menindak pelaku aksi deklarasi; FPI *reborn* tidak memiliki legalitas; aksi deklarasi merupakan pengalihan isu; aksi deklarasi merupakan fabrikasi kelompok tertentu; ada aktor intelektual di balik aksi deklarasi; penyebaran narasi Islamofobia; penguasa dan oligarki di balik aksi deklarasi; FPI merupakan pihak yang dirugikan; saat ini FPI bersikap netral; tidak mengenal Khairul Anam; oknum anggota partai juga berada di balik aksi deklarasi. Ia juga menanggapi pertanyaan di luar tema program sebagai berikut: sila kelima yang harus diuji kesaktiannya; RUU HIP berniat menggeser Pancasila; polisi harus menangkap oknum yang mengajukan RUU; agenda Islamofobia di balik semua peristiwa; fatwa MUI yang mengharamkan liberalisme; orang-orang yang mengedepankan ayat-ayat suci akan menjadi lawan pihak yang mengedepankan ayat-ayat konstitusi; berteori soal kebencian.

Gaya bertutur narasumber pertama: menggunakan bahasa baku; menyampaikan narasi dengan intonasi suara datar; menyampaikan narasi dengan intonasi tinggi. Ia juga kerap terus berbicara ketika narasumber lain memotong; memotong penjelasan narasumber; kerap menunjuk narasumber; menyimak narasumber yang seide atau bukan lawan debat; tidak mengindahkan permintaan *host*.

Narasumber kedua, Husin Shihab, menyampaikan narasi-narasi berupa pernyataan atau pertanyaan sebagai berikut: demo memiliki skenario dan penyandang dana; apakah FPI mendukung Anies?; pelaku aksi deklarasi bagian dari PA 212; kemungkinan massa bayaran; bantahan FPI tidak logis; konstruksi keterlibatan FPI dalam aksi deklarasi; upaya FPI mendapatkan legitimasi masyarakat. Ia juga menanggapi pertanyaan di luar tema program sebagai berikut: relawan Ganjar melakukan aksi deklarasi; dukungan simpatisan PA 212 dalam Pilkada; dukungan simpatisan PA 212 terhadap Formula E; tidak percaya pernyataan Novel; bantahan atas tuduhan antiagama; pihak yang membenci HRS atau PA 212 akan dituduh syiah, liberalis, atau antiagama; berteori soal kebencian; tidak akan membawa ayat dan mayat.



Gambar 2: Dua Narasumber Berdebat dalam Program *Catatan Demokrasi* di Stasiun *tvOne* (Foto: *tvOne*).

Gaya bertutur narasumber kedua: menggunakan bahasa baku; menggunakan bahasa pergaulan; menggunakan narasi sarkasme; menyerang secara personal; menyampaikan narasi

dengan intonasi suara datar; menyampaikan narasi dengan intonasi tinggi. Ia juga kerap terus berbicara ketika narasumber lain memotong; memotong penjelasan narasumber; sering menunjuk narasumber; menyimak narasumber yang seide atau bukan lawan debat; tersenyum-senyum atau tertawa ketika lawan debat berbicara; tidak mengindahkan permintaan *host*.

Narasumber ketiga, Islah Bahrawi, menyampaikan narasi-narasi berupa pernyataan atau pertanyaan sebagai berikut: aksi deklarasi terkait politisasi agama; tidak menguasai persoalan FPI *reborn*; tidak ada *state actor* dan fabrikasi di balik aksi deklarasi. Ia juga menanggapi pertanyaan di luar tema program sebagai berikut: perilaku politisasi agama sebagai akar masalah berbagai peristiwa; *political toys* pada manusia beragama; sejarah perpecahan kalangan Islam zaman dulu; aksi Khilafatul Muslimin; umat beragama jadi korban politisasi agama; politik di balik semua peristiwa; Mustofa merupakan pelaku politisasi agama; Mustofa pernah dideportasi dari Suriah; gerakan kekerasan berbasis agama sebagai pengaruh pemikiran Barat; adanya undang-undang yang bersentuhan dengan persoalan kekerasan; gerakan-gerakan yang berkeinginan menghadirkan tokoh pembaharu pada 2024; tidak ada *state actor* dan fabrikasi di balik Khilafatul Muslimin; penggunaan narasi agama untuk kepentingan politik; agama harus mengedepankan pengetahuan; politisasi agama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, termasuk syariat Islam; jangan memandang agama dari kacamata kebencian; memuji kebijakan pemerintah soal kebebasan berdemokrasi; menolak keberadaan khilafah; polisi agak menindak aksi Khilafatul Muslimin.

Gaya bertutur narasumber ketiga: menggunakan bahasa baku; menggunakan narasi sarkasme; menyerang secara personal; menyampaikan narasi dengan intonasi suara datar; menyampaikan narasi dengan intonasi tinggi. Ia juga kerap terus berbicara ketika narasumber lain memotong; memotong penjelasan narasumber; sering menunjuk narasumber; menyimak narasumber yang seide atau bukan lawan debat; tersenyum-senyum atau tertawa ketika lawan debat berbicara; tidak mengindahkan permintaan *host*.

Narasumber keempat, Mustofa Nahrawardaya, menyampaikan narasi-narasi berupa pernyataan atau pertanyaan sebagai berikut: aksi deklarasi dimainkan “pemain musik”; pihak berwenang agar meminta keterangan dari pelaku aksi deklarasi; dugaan FPI palsu; ormas yang dikaitkan dengan radikalisme gampang difitnah; kelompok warga bernarasi negatif terhadap ormas yang dikaitkan radikalisme; ada oknum tertentu dan tujuan tertentu di balik aksi deklarasi; kegagalan aksi FPI *reborn*; tidak ada persoalan ideologi di balik aksi deklarasi. Ia juga menanggapi pertanyaan di luar tema program sebagai berikut: apakah peristiwa pembunuhan yang dilakukan PKI didorong agama?; pernyataan Islah terkesan agama di balik semua peristiwa; pernyataan Islah terkesan agama menjijikan; politisasi agama tidak dilarang pemerintah; pernyataan Islah kosong dan tidak bermanfaat; Islah memiliki misi tertentu sebagai penganut Islam liberal; menyayangkan pihak yang membenci agama; Khilafatul Muslimin sudah lama dan aparat pasti memahami keberadaannya; kegagalan aksi semacam Khilafatul Muslimin; “ormas” yang sengaja dipelihara; tidak ada persoalan ideologi di balik aksi Khilafatul Muslimin; persoalan agama didekatkan pada politisasi, kekerasan, terorisme, dan kemaksiatan; keadilan menjadi masalah bersama.

Gaya bertutur narasumber keempat: menggunakan bahasa baku; menyerang secara personal; menyampaikan narasi dengan intonasi suara datar. Ia juga kerap terus berbicara ketika narasumber lain memotong; memotong penjelasan narasumber; menyimak narasumber yang seide atau yang tidak seide.

Beranjak dari dekripsi program *Catatan Demokrasi* bertema *Siapa di Balik FPI Reborn?* di stasiun *tvOne* pada Juni 2022 di atas, penulis melakukan analisis data penelitian—perhatikan Tabel 2.

Tabel 2: Analisis Data Penelitian Program *Catatan Demokrasi*

KONSEP	ANALISIS DATA	SIMPULAN
Medan Wacana (<i>field of discourse</i>)	<p>HOST: Narasi dan pertanyaan para <i>host</i> adalah soal keterlibatan FPI dan berbagai spekulasi di balik aksi deklarasi FPI <i>reborn</i>. Narasi dan pertanyaan para <i>host</i> adalah soal aksi Khilafatul Muslimin dan berbagai spekulasi di baliknya, serta pelaku Islam Liberal.</p>	<p>HOST: Medan wacana kedua <i>host</i> berupa narasi dan pertanyaan yang cenderung menggali persoalan perbedaan-perbedaan politik tubuh berupa agama dan kepentingan-kepentingan lokal.</p>
	<p>NOVEL BAKMUMIN: Narasi narasumber berisikan klarifikasi keterlibatan FPI dan spekulasi keterlibatan pihak tertentu di balik aksi deklarasi FPI <i>reborn</i>. Narasi narasumber ini berisikan penjelasan atau jawaban persoalan lain di luar persoalan keterlibatan FPI dan berbagai spekulasi di balik aksi deklarasi FPI <i>reborn</i>. Meski demikian, ia masih bisa mengendalikan diri untuk konsisten pada tema program.</p>	<p>NOVEL BAKMUMIN: Medan wacana narasumber berupa klarifikasi, penjelasan, atau jawaban, soal tema program dan di luar tema program; dan narasi narasumber cenderung melebar ke berbagai hal yang bersifat asumtif, sekaligus mengumbar persoalan perbedaan-perbedaan politik tubuh berupa agama dan kepentingan-kepentingan lokal.</p>
	<p>HUSIN SHIHAB: Narasi narasumber berupa penolakan klarifikasi narasumber lain terkait keterlibatan FPI dan spekulasi keterlibatan pihak tertentu di balik aksi deklarasi FPI <i>reborn</i>. Narasi narasumber berupa penjelasan atau jawaban persoalan lain di luar persoalan keterlibatan FPI dan berbagai spekulasi di balik aksi deklarasi FPI <i>reborn</i>. Narasi narasumber cenderung melebar ke berbagai hal yang bersifat asumtif dan tendensius kepada narasumber lain.</p>	<p>HUSIN SHIHAB: Medan wacana narasumber berupa penolakan klarifikasi narasumber lain, penjelasan, atau jawaban, soal tema program dan di luar tema program; dan narasi narasumber cenderung melebar ke berbagai hal yang bersifat asumtif dan tendensius kepada narasumber lain, sekaligus mengumbar persoalan perbedaan-perbedaan politik tubuh berupa agama dan kepentingan-kepentingan lokal.</p>
	<p>ISLAH BAHRAWI: Narasi narasumber berupa penegasan soal ketidakmengertiannya atas keterlibatan FPI dan spekulasi keterlibatan pihak tertentu di balik aksi deklarasi FPI <i>reborn</i>. Narasi narasumber ini berisikan penjelasan atau jawaban persoalan lain di luar persoalan keterlibatan FPI dan berbagai spekulasi di balik aksi deklarasi FPI <i>reborn</i>. Narasi narasumber ini cenderung mengusung tema baru di luar tema program, serta ia juga kerap bersifat tendensius kepada narasumber lain.</p>	<p>ISLAH BAHRAWI: Medan wacana narasumber berupa penegasan soal ketidakmengertian, penjelasan, atau jawaban, soal tema program dan di luar tema program; dan narasi narasumber cenderung mengusung tema baru di luar tema program, serta ia juga kerap bersifat tendensius kepada narasumber lain, sekaligus mengumbar persoalan perbedaan-perbedaan politik tubuh berupa agama dan kepentingan-kepentingan lokal.</p>
	<p>MUSTOFA NAHRAWARDAYA: Narasi narasumber berupa penjelasan soal keterlibatan FPI dan spekulasi keterlibatan pihak tertentu di balik aksi deklarasi FPI <i>reborn</i>. Narasi narasumber berupa penjelasan atau jawaban persoalan lain di luar persoalan keterlibatan FPI dan berbagai spekulasi di balik aksi deklarasi FPI <i>reborn</i>. Narasi narasumber cenderung berupa pembelaan atas identitasnya dan ia juga kerap bersifat tendensius kepada narasumber lain</p>	<p>MUSTOFA NAHRAWARDAYA: Medan wacana narasumber berupa penjelasan atau jawaban soal tema program dan di luar tema program; dan narasi narasumber cenderung berupa pembelaan atas identitasnya dan ia juga kerap bersifat tendensius kepada narasumber lain, sekaligus mengumbar persoalan perbedaan-perbedaan politik tubuh berupa agama dan kepentingan-kepentingan lokal.</p>

<p>Pelibat Wacana (<i>tenor of discourse</i>)</p>	<p>NOVEL BAKMUMIN: Narasumber sering tampil di media televisi sebagai juru bicara FPI atau PA 212. Meski tidak terlalu kuat dalam berargumentasi, ia sering dihadirkan sebagai narasumber karena pengetahuan dan dedikasinya sebagai pengurus FPI atau PA 212. Ia termasuk <i>newsmaker</i>.</p>	<p>NOVEL BAKMUMIN: Pelibat wacana merupakan <i>newsmaker</i> terkait aksi organisasi yang dijadikan tema program dan isu-isu politik identitas. serta bagian dari kubu yang mengkritisi kebijakan pemerintah.</p>
	<p>HUSIN SHIHAB: Narasumber ini sering tampil di media televisi sebagai Ketua Cyber Indonesia dan penggiat media sosial. Meski tidak terlalu kuat dalam berargumentasi, ia sering dihadirkan sebagai narasumber karena kiprahnya sebagai penggiat media sosial yang memerangi kaum oposan, erta bagian dari kubu yang membela kebijakan pemerintah</p>	<p>HUSIN SHIHAB: Pelibat wacana merupakan “<i>newsmaker</i>” karena kiprahnya sebagai penggiat media sosial yang memerangi kaum oposan, erta bagian dari kubu yang membela kebijakan pemerintah.</p>
	<p>ISLAH BAHRAWI: Narasumber ini sering tampil di media televisi sebagai Ketua Jaringan Moderasi Islam dan aktivis Islam Liberal. Ia dianggap memiliki pengetahuan yang memadai soal terorisme, Islam Liberal, dan politik identitas. Ia lebih sering diposisikan sebagai bagian dari kubu yang membela kebijakan pemerintah.</p>	<p>ISLAH BAHRAWI: Pelibat wacana merupakan <i>newsmaker</i> terkait persoalan terorisme, Islam Liberal, dan politik identitas, serta bagian dari kubu yang membela kebijakan pemerintah.</p>
	<p>MUSTOFA NAHRAWARDAYA: Narasumber ini sering tampil di media televisi sebagai politisi Partai Umat dan kader ormas agama. Ia dianggap memiliki pengetahuan yang memadai soal terorisme, Islam Liberal, dan politik identitas. Ia lebih sering diposisikan sebagai bagian dari kubu yang mengkritisi kebijakan pemerintah</p>	<p>MUSTOFA NAHRAWARDAYA: Pelibat wacana merupakan <i>newsmaker</i> terkait persoalan terorisme, Islam Liberal, dan politik identitas, serta bagian dari kubu yang mengkritisi kebijakan pemerintah.</p>
<p>Mode Wacana (<i>mode of discourse</i>)</p>	<p>HOST: Gaya bertutur dan intonasi para <i>host</i> dalam menyampaikan narasi, mengajukan pertanyaan, atau mengatur lalu lintas diskusi, cenderung dilakukan secara datar dan secara provokatif. Mereka juga cenderung membiarkan narasumber menyampaikan pernyataan yang melebar, membiarkan perdebatan secara bebas, membiarkan kericuhan, juga memberikan porsi berbicara yang tidak berimbang.</p>	<p>HOST: Mode wacana kedua <i>host</i> berupa gaya bertutur dan intonasi dalam menyampaikan narasi, mengajukan pertanyaan, atau mengatur lalu lintas diskusi, yang cenderung dilakukan secara datar dan secara provokatif. Mereka juga cenderung membiarkan narasumber menyampaikan pernyataan yang melebar, membiarkan perdebatan secara bebas, membiarkan kericuhan, juga memberikan porsi berbicara yang tidak berimbang.</p>
	<p>NOVEL BAKMUMIN: Gaya bertutur dan intonasi narasumber ini dalam menyampaikan narasi atau berdebat cenderung menggunakan bahasa baku, dengan intonasi datar dan intonasi tinggi; terus berbicara ketika narasumber lain memotong; memotong penjelasan narasumber; kerap menunjuk narasumber; menyimak narasumber yang seide atau bukan lawan debat; dan tidak mengindahkan permintaan <i>host</i>.</p>	<p>NOVEL BAKMUMIN: Mode wacana narasumber berupa gaya bertutur dan intonasi dalam menyampaikan narasi dan berdebat cenderung menggunakan bahasa baku, dengan intonasi datar dan intonasi tinggi; terus berbicara ketika narasumber lain memotong; memotong penjelasan narasumber; kerap menunjuk narasumber; menyimak narasumber yang seide atau bukan lawan debat; dan tidak mengindahkan permintaan <i>host</i>.</p>
	<p>HUSIN SHIHAB: Gaya bertutur dan intonasi narasumber ini dalam menyampaikan narasi atau berdebat cenderung</p>	<p>HUSIN SHIHAB: Mode wacana narasumber berupa gaya bertutur dan intonasi narasumber dalam</p>

<p>menggunakan bahasa baku, bahasa pergaulan, dan bahasa sarkasme; dengan intonasi datar dan intonasi tinggi; terus berbicara ketika narasumber lain memotong; memotong penjelasan narasumber; kerap menunjuk narasumber; menyimak narasumber yang seide atau bukan lawan debat; dan tidak mengindahkan permintaan <i>host</i>.</p>	<p>menyampaikan narasi atau berdebat cenderung menggunakan bahasa baku, bahasa pergaulan, dan bahasa sarkasme; dengan intonasi datar dan intonasi tinggi; terus berbicara ketika narasumber lain memotong; memotong penjelasan narasumber; kerap menunjuk narasumber; menyimak narasumber yang seide atau bukan lawan debat; dan tidak mengindahkan permintaan <i>host</i>.</p>
<p>ISLAH BAHRAWI: Gaya bertutur dan intonasi narasumber ini dalam menyampaikan narasi atau berdebat cenderung menggunakan bahasa baku dan bahasa sarkasme; dengan intonasi datar dan intonasi tinggi; terus berbicara ketika narasumber lain memotong; memotong penjelasan narasumber; kerap menunjuk narasumber; menyimak narasumber yang seide atau bukan lawan debat; dan tidak mengindahkan permintaan <i>host</i>.</p>	<p>ISLAH BAHRAWI: Mode wacana narasumber berupa gaya bertutur dan intonasi narasumber dalam menyampaikan narasi atau berdebat cenderung menggunakan bahasa baku dan bahasa sarkasme; dengan intonasi datar dan intonasi tinggi; terus berbicara ketika narasumber lain memotong; memotong penjelasan narasumber; kerap menunjuk narasumber; menyimak narasumber yang seide atau bukan lawan debat; dan tidak mengindahkan permintaan <i>host</i>.</p>
<p>MUSTOFA NAHRAWARDAYA: Gaya bertutur dan intonasi narasumber ini dalam menyampaikan narasi atau berdebat cenderung menggunakan bahasa baku; dengan intonasi datar; terus berbicara ketika narasumber lain memotong; memotong penjelasan narasumber; menyimak narasumber yang seide atau atau yang tidak seide.</p>	<p>MUSTOFA NAHRAWARDAYA: Mode wacana narasumber berupa gaya bertutur dan intonasi narasumber dalam menyampaikan narasi atau berdebat cenderung menggunakan bahasa baku; dengan intonasi datar; terus berbicara ketika narasumber lain memotong; memotong penjelasan narasumber; menyimak narasumber yang seide atau atau yang tidak seide.</p>

Komodifikasi merupakan kegiatan produksi dan distribusi komoditas yang lebih menimbang daya tarik agar bisa dipuja oleh orang sebanyak-banyaknya, tanpa mempertimbangan konteks sosial, yang diimplementasikan dalam tiga aspek: isi media, khalayak, dan pekerja. Praktik komodifikasi isi media berkaitan erat dengan pemilihan materi genre bertema sensasional, yang melibatkan kehidupan seputar artis dan selebritas, tapi juga reaksi negatif masyarakat dan sikap media melalui pemilihan kalimat bersifat hiperbola dan provokatif.

Dalam konteks program *talk show* di media televisi, komoditas adalah tema-tema diskusi bersifat sensasional, melibatkan “selebritas-selebritas” bersifat sensasional, dan disertai drama-drama bersifat sensasional pula. Medan program mencakup peristiwa atau wacana aktual dan berpotensi menjadi perbincangan orang banyak (meski ia tidak berpotensi menjadi referensi). Pelibat program mencakup kalangan *newsmaker* atau “*newsmaker*” cerdas dan berpotensi menjadikan program menarik dan dipuja-puja khalayak (meski ia tidak berpotensi memberikan pelajaran apa pun). Mode program mencakup narasi-narasi hiperbola, sinisme, tendensius, dan provokatif, juga aksi-aksi dramatik yang berpotensi menghibur orang banyak (meski ia tidak berpotensi menjadi contoh kehidupan). Inilah perayaan komodifikasi!

Perayaan ini mendapatkan suntikan energi besar berupa perbedaan-perbedaan politik tubuh, yang diperlihatkan wajah-wajah segar etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal. Keberadaan perayaan ini disempurnakan bingkai besar bernama agenda politik, yang sangat bersemangat menyodorkan ide-ide apa pun demi kepentingan individu atau kepentingan

kelompok. Bahkan, ia tidak pernah menimbang ancaman-ancaman perusakan tatanan kehidupan.

Mobilisasi berbasis identitas diaktualisasikan oleh pasangan calon gubernur yang berkompetisi dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2012 menjadi contoh menarik pertarungan ide-ide politik identitas. Pilkada DKI Jakarta pada 2017 mempertajam pergulatan gagasan-gagasan politik identitas. Setelah pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tampil sebagai pemenang dalam konstelasi politik ini tidak serta merta menyurutkan kelompok-kelompok masyarakat yang telah terpecah untuk terus berkelahi. Ironisnya, perkelahian ini masih mengusung tema-tema politik identitas.

Realitas perpecahan ini makin menjadi-jadi jelang pelaksanaan Pilpres 2019. Para politisi, simpatisan, dan makhluk-makhluk politik lain yang tidak jelas identitasnya, memainkan isu-isu politik identitas demi mendongkrak elektabilitas seorang kandidat dan menjatuhkan kandidat lain. Media *mainstream* dan media sosial sama rakusnya dalam melahap wacana-wacana bermuatan politik identitas. Slot tayang dan slot distribusi menghamburkan pesan-pesan komodifikatif ini dengan penuh suka.

Para *host* di media televisi memberikan pernyataan, pertanyaan, penganturan lalu lintas bicara, dalam suasana sensasional, demi memberikan daya tarik sebuah program *talk show*. Bila utamaya dianggap tidak mampu mengumbar sensasi politik identitas, maka mereka harus menyiapkan tema sejenis dan menyodorkannya ke hadapan narasumber sesegera mungkin. Para narasumber pun menyambutnya dengan antusias. Mereka berebutan menyodorkan asumsi-asumsi dan argumentasi demi terlihat cerdas, mumpuni, dan konsisten sebagai *newsmaker*. Perdebatan dan kericuhan yang menjurus ke wilayah sarkasme pun tidak perlu dipersoalkan, karena ini merupakan bumbu terguir sebuah program televisi.

Tema program pun telah berubah. Medan wacana pun telah berganti. Tanpa terasa, atmosfer pertarungan politik identitas kian memuncak. Di penghujung program, seorang penceramah memberikan sedikit tausiyah. Para *host* menyimak, para narasumber terdiam, dan khalayak meraih *remote control* untuk memindahkan tontonan ke kanal lain. Inilah rutinitas dalam bingkai komodifikasi politik identitas.

Media televisi menjadi organisasi yang paling berkepentingan dalam mengonstruksi medan wacana, pelibat wacana, dan mode wacana, hingga menjadi pesan-pesan televisi. Khalayak menjadi sasaran utama untuk menerima dan menikmati sajian drama-drama dalam pesan-pesan televisi ini. Kuasa hegemoni dan kepentingan ekonomi politik media mengatur lingkaran rutinitas tanpa terganggu situasi politik. Sebaliknya, kuasa hegemoni dan kepentingan ekonomi politik media ini yang menjadi pengatur suhu politik. Keberadaan kuasa hegemoni dan kepentingan ekonomi politik media ini juga yang menjadi pondasi implementasi praktik-praktis komodifikasi, dengan komodifikasi politik identitas menjadi bagian kecilnya

3. KESIMPULAN

Praktik komodifikasi politik identitas dalam program *Catatan Demokasi* episode *Siapa di Balik FPI Reborn?* di stasiun *tvOne* pada Juni 2022 sebagai berikut: medan wacana menyajikan narasi-narasi berbentuk klarifikasi, penolakan klarifikasi, ketidakmengertian, penjelasan, dan jawaban, bersifat asumptif, tendesius, pembelaan atas identitas, tentang perbedaan-perbedaan politik tubuh berupa agama dan kepentingan-kepentingan lokal; pelibat wacana merupakan *newsmaker* atau "*newsmaker*" terkait persoalan terorisme, Islam Liberal, dan politik identitas,

bagian dari kubu yang membela kebijakan pemerintah, dan bagian dari kubu yang mengkritisi kebijakan pemerintah; dan mode wacana memperlihatkan gaya bertutur dan intonasi dalam menyampaikan narasi menggunakan bahasa baku, bahasa pergaulan, dan bahasa sarkasme, dengan intonasi datar dan intonasi tinggi, serta mimik dan *gesture* yang hiperbola dan provokatif.

Simpulan praktik komodifikasi politik identitas dalam program *Catatan Demokasi* episode *Siapa di Balik FPI Reborn?* di stasiun *tvOne* pada Juni 2022 ini bukan sekadar gambaran praktik komodifikasi politik identitas sebagai *subject matter* dalam penelitian yang mempertautkan hubungan antara agama dan pengikut agama, serta media. Persisnya, teks-teks media yang diproduksi dan didistribusikan oleh para awak media (dengan identitas keagamaannya dan pemahamannya tentang agama). Tapi, simpulan ini juga membuktikan terjadinya degradasi atas batasan politik identitas yang telah lama dikenal, yakni perjuangan wacana tertindas terkait perbedaan-perbedaan politik tubuh berupa etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal. Bahwa politik identitas yang dimaksud dalam perayaan komodifikasi politik identitas di media televisi adalah *black-campaign* kelompok masyarakat tertentu atas kehidupan keagamaan individu atau kelompok masyarakat tertentu.

PENGHARGAAN

Tiada penghargaan kepada mana-mana pihak diperlukan.

PEMBIAYAAN

Pengarang tidak menerima sokongan kewangan untuk penyelidikan, kepengarangan, dan/atau penerbitan artikel ini.

SUMBANGAN PENULIS

Syaiful Halim adalah pengarang tunggal artikel ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis mengisytiharkan tiada konflik kepentingan yang berkenaan dalam artikel ini.

REFERENSI

- Al-Azami, S. (2016). *Religion in the Media: A Linguistic Analysis*. London: Palgrave Macmillan.
- Bahri, M. Z. (2015). *Wajah Studi Agama-agama: Dari Era Teosofi Indonesia (1901-1940) hingga Massa Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Connolly (ed), P. (2012). *Aneka Pendekatan Studi Agama* (P. Connolly (ed.). Yogyakarta: LKiS.
- Dessy Suciati Saputri. (2022). *Jokowi: Jangan Ada Politik Identitas dan Politisasi Agama di Pemilu 2024*, diakses pada 25 Juni 2022 dari <https://sindikasi.republika.co.id/berita/rgp5gu436/jokowi-jangan-ada-politik-identitas-dan-politisasi-agama-di-pemilu-2024>.
- Fautanu, Idzam, M, Buhori, dan Gunawan, H. (2020). Politik Identitas dalam Pilkada DKI

- Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dalam *Jurnal Ilmu Politik POLITICON*, 2(2), 87-112.
- Halim, S. (2021). *Postkomodifikasi Media: Varian-varian Baru Komodifikasi di Media Televisi dan Media Sosial*. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Halliday, M. A. K. (2007). Language as Social Semiotic: Towards a General Sociolinguistic Theory (1975) in Halliday, M. A. K. & J. J. W. (ed) dalam *Language and Society* Bloomsbury Publishing.
- Haq, I. (2014). *Kontroversi Isu Penolakan Pemimpin Non-Muslim di Tengah Masyarakat Muslim (Studi Analisis Semiotika Sosial MK Halliday Pemberitaan Lurah Susan di republik.co.id dan suarapembaruan.com)*. Skripsi, S1 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara.
- Indah, S. (2019). *Citra Media Berdasarkan Penggunaan Gaya Bahasa pada Rubrik Esai dalam mojok.co (Sebuah Kajian Semiotika M.A.K Halliday)*. Skripsi, S1 Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Diponegoro.
- Lobodally, A. (2014). Transformasi Simbolik Homoseksual di Televisi (Sebuah Studi Analisis Semiotika Barthes dan Semiotika Sosial M.A.K. Halliday dalam Program CS: File Kompas TV) dalam *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, 8(1). 79-107.
- Maarif, A. S. (2012). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Democracy Project.
- Rakhmani, I. (2016). *Mainstreaming Islam in Indonesia: Television, Identity, and the Middle Class*. London: Palgrave Macmillan.
- Sabarudin, D. (2018). Politik Identitas dan Jejaring Politik Dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012 dalam *Media Komunika (Jurnal Komunikasi) Universitas Sangga Buana YPKP*, 3(1), 25–41.
- Santoso, A. (2008). Jejak Halliday dalam Linguistik Kritis dan Analisis Wacana Kritis dalam *Bahasa Dan Seni*, 1(1), 1-15.
- Sonny. (2021). “Catatan Demokrasi” Program Talkshow Hardnews Terbaru dari tvOne. TvOne, diakses pada 25 Juni 2022 dari <https://www.inanews.co.id/2021/03/catatan-demokrasi-program-talkshow-hardnews-terbaru-dari-tvone/>.
- Sudiby, A. (2009). *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKiS.
- Trianto, D. (2022). *Dekati Ormas, KPU Ingatkan Bahaya Politik Identitas Jelang Pemilu 2024*, diakses pada 25 Juni 2022 dari <https://nusantara.rmol.id/read/2022/07/06/539284/dekati-ormas-kpu-ingatkan-bahaya-politik-identitas-jelang-pemilu-2024>.
- Triantoro, D. A. (2019). Praktik Politik Identitas dalam Akun Media Sosial Anies-Sandi dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 16(1), 19–40.
- tvOne. (2008). *Tentang Kami*, diakses pada 25 Juni 2022 dari <https://www.tvonenews.com/tentang-kami>.
- tvOne. (2022). *Siapa Dibalik FPI Reborn? [FULL] | Catatan Demokrasi tvOne*, diakses pada 25 Juni 2022 dari <https://www.youtube.com/watch?v=pTSkfDaVWIg>.

Surat kami : 700-KPK (PRP.UP.1/20/1)

Tarikh : 20 Januari 2023

Prof. Madya Dr. Nur Hisham Ibrahim
Rektor
Universiti Teknologi MARA
Cawangan Perak



Tuan,

PERMOHONAN KELULUSAN MEMUAT NAIK PENERBITAN UiTM CAWANGAN PERAK MELALUI REPOSITORI INSTITUSI UiTM (IR)

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa pihak kami ingin memohon kelulusan tuan untuk mengimbas (*digitize*) dan memuat naik semua jenis penerbitan di bawah UiTM Cawangan Perak melalui Repositori Institusi UiTM, PTAR.

3. Tujuan permohonan ini adalah bagi membolehkan akses yang lebih meluas oleh pengguna perpustakaan terhadap semua maklumat yang terkandung di dalam penerbitan melalui laman Web PTAR UiTM Cawangan Perak.

Kelulusan daripada pihak tuan dalam perkara ini amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

Setuju.

27.1.2023

SITI BASRIYAH SHAIK BAHARUDIN
Timbalan Ketua Pustakawan

PROF. MADYA DR. NUR HISHAM IBRAHIM
REKTOR
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
CAWANGAN PERAK
KAMPUS SERI ISKANDAR

nar